

Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi

Febby Syah Putri Mulyani¹; Masyitha Putri Fahmi²; Selatri Wulandari²; Yolanda Rasyid¹ dan Muhammad Ahyaruddin^{1*}



AFILIASI:

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

² Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

*KORESPONDENSI:

ahyaruddin@umri.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v6i1.12837

SITASI:

Mulyani, F. S. P., Fahmi, M. P., Wulandari, S., Rasyid, Y., & Ahyaruddin, M. (2022).

Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 33-52.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

30 Sep 2021

Reviu:

05 Mar 2022

03 Apr 2022

Revisi:

02 Apr 2022

12 Apr 2022

Diterbitkan:

23 Apr 2022



Abstrak:

Latar Belakang: Permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih sering terjadi. Terdapat temuan yang selalu berulang-ulang di setiap tahunnya. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang temuan kasus atas ketidakpatuhan perundang-undangannya sebesar 8%. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun di setiap tahunnya Badan Pemeriksaan Keuangan selalu menemukan adanya permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib. **Tujuan:** Riset ini bertujuan menyediakan fakta empiris tentang determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah kota pekanbaru. Secara khusus, riset ini menguji pengaruh kualitas anggaran, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, riset ini juga menguji peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.

Metode Penelitian: Riset ini adalah riset empirik menggunakan metode kuantitatif berbasis data primer. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 64 pegawai. Riset ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM)* dengan bantuan *software WarpPLS* dalam analisis data dan uji hipotesis.

Hasil Penelitian: Hasil riset membuktikan bahwa kualitas anggaran, penerapan SIPKD, dan Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil riset ini menemukan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh penerapan SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Ruang lingkup riset hanya dilakukan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pekanbaru sehingga generalisasi hasil riset masih rendah dan belum tentu bisa samakan dengan daerah lain. Riset ini menguji determinan atau faktor penentu optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan memasukkan peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.

Kata kunci: Kualitas Anggaran; Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengawasan Fungsional; Pengelolaan Keuangan Daerah; Komitmen Pimpinan.

Pendahuluan

Permasalahan tentang pengelolaan keuangan daerah masih sering terjadi. Terdapat temuan yang selalu berulang-ulang di setiap tahun. Taufik selaku Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, mengatakan bahwa terdapat temuan audit tentang ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota se-Riau tahun 2018 dan 2019, yang menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp. 34,2 miliar (Hasan, 2020). Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah adanya penyimpangan administrasi atas pengelolaan kegiatan dan anggaran daerah, yaitu tidak tertibnya pengelolaan keuangan/kas daerah. Peningkatan yang sangat signifikan pada kasus yang menyebabkan kekurangan penerimaan negara/daerah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 6,7 miliar dan kemudian meningkat di tahun 2019 mencapai Rp. 27,5 miliar, dimana ditemukan 38 kasus atas ketidakpatuhan perundang-undangan (Hasan, 2020). Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang temuan kasus atas ketidakpatuhan perundang-undangannya sebesar 8%, yang kemudian berdampak pada kerugian negara, kekurangan penerimaan negara/daerah serta penyimpangan administrasi (Hasan, 2020). Jika dilihat dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, namun BPK selalu menemukan permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib setiap tahun. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan: (1) Sistem Pengendalian Intern (2) Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (3) Tidak tertibnya penatausahaan kas (4) Tidak tertibnya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap (5) Kekurangan volume pekerjaan fisik (6) Penganggaran dan manajemen kas yang tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta (7) Penatausahaan investasi nonpermanen yang belum sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir. Sehingga, BPK merekomendasikan pemerintah untuk segera menindaklanjuti, melakukan perbaikan, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah (BPK RI, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan pengendalian akuntansi dan pelaporan akuntansi secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan anggaran yang berkualitas. Kualitas anggaran yang tinggi akan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi pula dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kenis (1979) mengungkapkan bahwa karakteristik anggaran meliputi partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan sasaran anggaran. Shara (2018) mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Aziz dkk (2016) juga menemukan bahwa evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Namun berbeda dengan Afrida (2017) dan Fitra (2016) yang mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kota

Padang. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti ingin menguji pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2010, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sudah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekanbaru dalam menunjang implementasi pengelolaan keuangan daerah agar terwujud prinsip efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Penerapan SIPKD membantu pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, penerapan SIPKD juga membantu pemerintah daerah dalam menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, serta membantu menyusun LKPD dalam perumusan kebijakan fiskal secara nasional. Syahdi dan Bijaang (2018) menemukan bahwa implementasi SIPKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo. Yusup (2016) juga menemukan bahwa SIPKD mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah Kota Bandung. Hal ini membuat peneliti tertarik menguji mengenai implementasi SIPKD yang belum bisa mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Ditambah lagi dengan hasil penelitian yang berbeda dari Utama (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti semakin tertarik menguji hal tersebut.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah juga membutuhkan pengawasan fungsional yang baik, agar memperoleh kepastian pelaksanaan kegiatan seperti yang sudah direncanakan. Pengawasan fungsional yang baik akan menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfiza (2016), menemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Utami (2016) yang melakukan riset di Kota Payakumbuh juga menemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Namun berbeda dengan Sauqi (2017) yang mengungkapkan bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Hal ini membuat peneliti tertarik menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Peneliti menambahkan variabel komitmen pimpinan sebagai variabel pemoderasi. Peran komitmen pimpinan sangat penting, karena tanpa adanya keinginan dan kemauan yang kuat dari pimpinan, tujuan organisasi akan sulit tercapai secara maksimal. Dengan begitu, jika kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan fungsional diiringi dengan keinginan dan kemauan yang kuat dari pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi, maka upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang optimal akan tercapai secara maksimal. Lubis dan Saripudin (2017) membuktikan komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi akuntansi, komitmen, dan mutasi PPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bontang. Yuliana dkk (2021)

menemukan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen, sistem pengendalian internal, dan kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Namun berbeda dengan Belo dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa komitmen pimpinan tidak memoderasi kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah komitmen pimpinan berperan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan implikasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait bagaimana melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar meminimalisir terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan ilmiah dalam pengembangan literatur khususnya akuntansi sektor publik, yaitu pengembangan teori/konsep *public expenditure management* sehingga menghasilkan kebaruan ilmu dalam penganggaran sektor publik dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, khususnya pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah.

Tinjauan Literatur

Public Expenditure Management

Schick (1999) menerangkan tiga elemen utama dalam *public expenditure management*, yang pertama yaitu disiplin fiskal agregat, yaitu sebuah *guideline* dalam mewujudkan anggaran yang berkesinambungan. Konsep ini akan bisa berhasil dengan menerapkan kerja sama dan komitmen yang baik antar lembaga. Kedua yaitu efisiensi alokasi, dimana pemerintah perlu melakukan prioritas anggaran guna mencapai sasaran pembangunan berdasarkan pada prioritas, program, dan kegiatan pokok anggaran. Penentuan prioritas dan kegiatan prioritas harus fokus, jelas dan terukur agar dapat memecahkan masalah yang muncul dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Ketiga yaitu efisiensi operasional, yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan dengan biaya yang sehemat mungkin, namun tetap dapat menghasilkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Tiga elemen utama konsep *public expenditure management* ini mendukung pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah, karena penerapan konsep ini mewujudkan anggaran yang berkesinambungan, prioritas anggaran dialokasikan sesuai sasaran pembangunan dan harapan masyarakat, dan mewujudkan keefisienan dari penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas anggaran dihasilkan dari proses pengalokasian anggaran yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah oleh pihak-pihak yang terlibat, secara bijak merumuskan suatu kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (Octariani, 2017). Jika sasaran anggaran terGambarkan dengan baik, tindakan evaluasi

anggaran dilakukan dengan baik, dan aparat pemerintah mengetahui umpan balik anggaran, maka akan menghasilkan anggaran yang berkualitas. Sasaran anggaran harus jelas, spesifik dan dapat dimengerti. Tindakan evaluasi anggaran juga dibutuhkan untuk menilai apakah realisasi anggaran sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Anggota organisasi harus mengetahui umpan balik anggaran. Jika anggota mengetahui kekurangan atau kelebihan dari pelaksanaan anggaran, maka mampu memberikan dorongan untuk bekerja lebih efektif dan efisien atau mencapai prestasi yang lebih baik. Shara (2018) dalam penelitiannya di Kota Medan mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Aziz, dkk (2016) juga menemukan bahwa evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran pada OPD di Aceh memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Kualitas anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Implementasi SIPKD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi SIPKD dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Jika SIPKD ditunjang oleh kualitas informasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas sistem yang baik, maka SIPKD berjalan secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Syahdi dan Bijaang (2018) menemukan bahwa implementasi SIPKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo. Begitu juga dengan penelitian Yusup (2016) yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan SIPKD, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian yang dirumuskan adalah:

H2: Implementasi SIPKD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan fungsional berfungsi mencegah timbulnya penyimpangan pelaksanaan anggaran, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Prinsip pengawasan fungsional adalah membantu memahami bagaimana tindakan yang salah bisa dilakukan tindakan korektif sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran. Maka kegiatan pengawasan perlu dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan. Oleh karena itu, secara konseptual pengawasan fungsional yang dilakukan bisa mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin sering kegiatan pengawasan dilakukan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Mahfiza (2016) yang melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa jika pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian semakin baik, maka pengelolaan keuangan daerah juga semakin baik. Lebih lanjut, Utami (2016)

juga menemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah

Komitmen pimpinan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya komitmen pimpinan, pimpinan organisasi akan melakukan segala hal agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam hal ini, komitmen seorang pimpinan terkait dengan tiga hal, pertama yaitu keinginan dan kemauan yang kuat dari pimpinan dalam mengalokasikan anggaran secara bijak sesuai rencana pembangunan daerah dan harapan masyarakat. Jika pengalokasian anggaran diiringi dengan komitmen pimpinan dalam melaksanakan proses keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, serta pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien dengan menentukan prioritas yang fokus, jelas, dan terukur, maka anggaran yang telah dialokasikan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik. Lubis dan Saripudin (2017) membuktikan komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi akuntansi, komitmen, dan mutasi PPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bontang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, keinginan dan kemauan yang kuat dari pimpinan dalam mengusahakan dan meningkatkan kualitas informasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas SIPKD. Yuliana, dkk (2021) menemukan bahwa secara parsial komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen dan kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Belo, dkk (2018) juga mengungkapkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi variabel sistem informasi manajemen terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di pemerintah Kabupaten Waropen. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

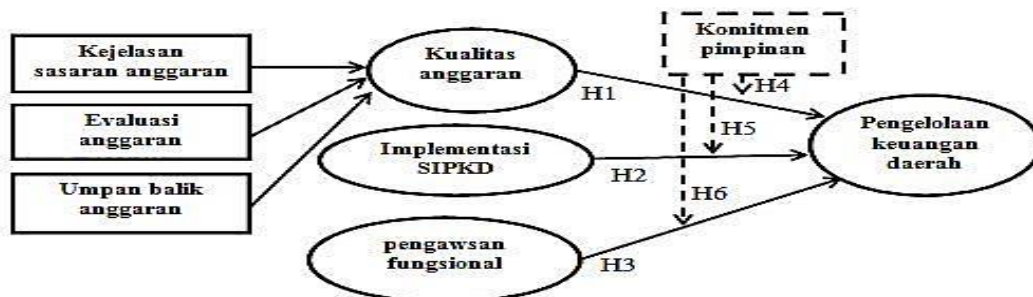
Ketiga, keinginan dan kemauan yang kuat dari pimpinan dalam melakukan pengawasan fungsional untuk menjamin organisasi berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kerja sama dan komitmen yang baik untuk melakukan

pengontrolan terhadap pengeluaran oleh pengguna anggaran. Yuliana dkk (2021) juga menemukan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas manajemen aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuisisioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelolaan keuangan di tiga OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria yaitu pegawai yang berada di bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan kas, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang pengelolaan aset, sehingga jumlah sampel penelitian ini sebanyak 64 pegawai. Pengumpulan data kuisisioner dilakukan melalui dua cara yaitu survei langsung dan melalui daring via *google form*. Pertanyaan kuisisioner memuat identitas responden dan daftar pernyataan tentang variabel yang diteliti yaitu kualitas anggaran, implementasi SIPKD, pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen pimpinan. Model penelitian (Gambar 1) dianalisis dan diuji menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) dengan bantuan *software WarpPLS* versi 7.0. Analisis PLS-SEM ini terdiri dari dua sub model yaitu (1) Model pengukuran (measurement model), dengan uji indikator reflektif yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Kemudian menggunakan uji indikator formatif yaitu *Significance of weights* dan *Multicollinearity*. (2) Model struktural (*structural model*), dengan menggunakan uji *R-Square*, uji *Q-Square test* dan uji *Estimate For Path Coefficient*. Penelitian ini merumuskan model penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data penelitian dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 64 responden. Data ini berasal dari tiga OPD kota Pekanbaru sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 19 kuesioner dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, 30 kuesioner dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan 15 kuesioner dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. Penjelasan tentang profil responden ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Profil Responden

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenjang Pendidikan		
Diploma	3	4,68
Sarjana	42	65,62
Master	13	20,31
Doktor	-	0
SMK	3	4,68
SMA	2	3,12
Tidak Menjawab	1	1,56
Jumlah	64	100
Pengalaman Kerja Di Pemerintahan		
< 2 tahun	14	21,88
2 – 5 tahun	7	10,94
6 – 10 tahun	18	28,13
11 – 15 tahun	21	32,81
> 15 tahun	4	6,25
Jumlah	64	100
Pengalaman Kerja Di Posisi Saat Ini		
< 2 tahun	26	40,62
2 – 5 tahun	22	34,37
6 – 10 tahun	11	17,18
11 – 15 tahun	2	3,12
>15 tahun	2	3,12
Tidak Menjawab	1	1,56
Jumlah	64	100

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa berdasarkan jenjang pendidikan responden yang menjadi objek penelitian didominasi oleh pegawai yang berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 42 pegawai atau sebesar 65,62%. Selain itu, responden dengan jumlah tertinggi kedua adalah pegawai yang berpendidikan Master yaitu sebanyak 13 pegawai atau sebesar 20,31%. Dari Tabel 1, juga dapat dilihat bahwa berdasarkan pengalaman kerja di pemerintahan responden didominasi oleh pegawai yang memiliki pengalaman 11 sampai 15 tahun yaitu sebanyak 21 pegawai atau sebesar 32,81%. Artinya responden yang mengisi kuisisioner dalam penelitian ini mayoritas adalah responden yang memiliki pengalaman yang cukup dan mengerti tentang pertanyaan yang diteliti. Selanjutnya jika dilihat dari segi pengalaman kerja di posisi saat ini, responden yang menjadi objek penelitian didominasi oleh pegawai yang memiliki pengalaman kurang dari 2 (dua) tahun yaitu sebanyak 26 pegawai atau sebesar 40,62%. Hal ini dinilai wajar jika mayoritas responden memiliki posisi jabatan saat ini relatif singkat karena pekerjaan di

pemerintahan seringkali dilakukan mutasi pegawai dalam jangka waktu tertentu, sehingga bisa saja mereka baru pindah dari posisi pekerjaan sebelumnya.

Evaluasi outer model (Model Pengukuran)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model pengukuran dievaluasi dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas setiap konstruk atau variabel laten. Dalam model pengukuran, terdapat dua pendekatan untuk mengukur konstruk, yaitu pengukuran reflektif dan pengukuran formatif. Konstruk reflektif antara lain implementasi SIPKD, pengawasan fungsional, komitmen pimpinan, dan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk konstruk formatif adalah variabel kualitas anggaran yang dibentuk oleh tiga konstruk reflektif (kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran). Konstruk reflektif dinilai berdasarkan nilai loading, sedangkan konstruk formatif dinilai berdasarkan nilai bobot indikator dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) (Sholihin dan Ratmono, 2013). Tabel 2 dan Tabel 3 menampilkan hasil pengujian validitas untuk setiap konstruk yang diteliti.

Tabel 2 Hasil uji validitas konvergen konstruk reflektif

Variabel	Item	Loading	P-Value
Implementasi SIPKD	Item 1	0,823	<0,001
	Item 2	0,854	<0,001
	Item 3	0,830	<0,001
	Item 4	0,863	<0,001
	Item 6	0,839	<0,001
	Item 7	0,829	<0,001
	Pengawasan fungsional	Item 1	0,777
Item 2		0,870	<0,001
Item 3		0,870	<0,001
Item 4		0,830	<0,001
Item 5		0,872	<0,001
Komitmen Pimpinan	Item 1	0,915	<0,001
	Item 2	0,796	<0,001
	Item 3	0,864	<0,001
	Item 4	0,857	<0,001
	Item 5	0,849	<0,001
Pengelolaan Keuangan Daerah	Item 2	0,760	<0,001
	Item 3	0,770	<0,001
	Item 4	0,926	<0,001
	Item 5	0,703	<0,001
	Item 6	0,893	<0,001

Tabel 3 Hasil uji validitas konvergen konstruk formatif

	Kualitas Anggaran	P Value	VIF
Iv_KSA (Kejelasan Sasaran Anggaran)	(0,280)	0,008	1,034
Iv_EA (Evaluasi Anggaran)	(0,521)	<0,001	1,331
Iv_UBA (Umpan Balik Anggaran)	(0,533)	<0,001	1,350

Dari Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas konvergen sudah memenuhi syarat atau sudah layak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading diatas 0,7 untuk konstruk reflektif dan nilai *P-value* yang di bawah 0,05 dan nilai VIF yang di bawah 3,3 untuk konstruk formatif. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk

reflektif atas indikator-indikatornya dan konstruk formatif dalam model pengukuran penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Selanjutnya, validitas diskriminan dinilai berdasarkan: (1) akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi antar konstruk; dan (2) *loading indicator* ke konstruk yang diukur lebih besar daripada *loading* ke konstruk lain (*cross-loadings* rendah) (Sholihin & Ratmono, 2013). Tabel 4 menampilkan hasil output pengujian validitas diskriminan dan hasilnya telah memenuhi kriteria. Hal ini dapat dilihat dari nilai akar AVE pada kolom diagonal yang lebih besar daripada korelasi antarkonstruk pada kolom yang sama.

Tabel 4 Hasil uji validitas diskriminan

Variabel	1	2	3	4	5
Kualitas Anggaran	0,725				
Implementasi SIPKD	0,433	0,706			
Pengawasan fungsional	0,445	0,623	0,845		
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,436	0,570	0,780	0,795	
Komitmen pimpinan	0,464	0,480	0,757	0,761	0,857

Evaluasi *inner model* (Model Struktural)

Pengujian model struktural terdiri dari *R-Squared*, *Q-Squared*, dan *path coefficient*. Tabel 5 menampilkan hasil uji *R-Squared* dan *Q-Squared*:

Tabel 5 *R-Squared* dan *Q-Squared*

	Reliabilitas Komposit	<i>R-Squared</i>	<i>Q-Squared</i>
Kualitas Anggaran	0,757	0,536	0,521
Implementasi SIPKD	0,916		
Pengawasan fungsional	1,000		
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,810		
Komitmen pimpinan	0,912		

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,536, hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel kualitas anggaran, implementasi SIPKD, pengawasan fungsional, dan komitmen pimpinan sebagai pemoderasi sebesar 53,6%. Hasil *R-Square* tersebut termasuk kategori sedang. Dari table 5 tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai *Q-Square* lebih besar dari nol yaitu 0,521. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki validitas prediktif dan relevansi yang baik.

Tabel 6 Koefisien Jalur, *P-Value*, dan *Effect Sizes*

Hipotesis	Hubungan	Koefisien Jalur	<i>P-Value</i>	Effect Size	Hasil Penelitian
H ₁	KA → PKD	0,222	0,030	0,117	Terdukung
H ₂	IM. SIPKD → PKD	0,252	0,016	0,138	Terdukung
H ₃	PF → PKD	0,196	0,050	0,103	Terdukung
H ₄	KP → KA → PKD	0,063	0,305	0,028	Tidak Terdukung
H ₅	KP → IM. SIPKD → PKD	0,227	0,027	0,110	Terdukung
H ₆	KP → PF → PKD	0,110	0,181	0,041	Tidak Terdukung

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa H_1 , H_2 , dan H_3 terbukti signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan *P-value* yang lebih kecil dari 0,050. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, hasil analisis H_5 juga terbukti signifikan dengan *P value* 0,027. Hasil ini mengindikasikan bahwa komitmen pimpinan memiliki peran moderasi terhadap pengaruh antara implementasi SIPKD dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, hasil analisis H_4 dan H_6 tidak terdukung atau tidak signifikan. Berdasarkan Tabel 6, H_4 dan H_6 memiliki *P value* lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa komitmen pimpinan tidak memoderasi pengaruh kualitas anggaran dan pengawasan fungsional pada pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa H_1 terbukti signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Shara (2018) dan penelitian Aziz dkk (2016) yang menemukan bahwa secara parsial evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Nilai *effect size* yang dimiliki oleh variabel kualitas anggaran menjelaskan bahwa kualitas anggaran merupakan faktor yang relevan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Semakin meningkatnya kualitas anggaran pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih optimal. Anggaran yang berkualitas dengan menerapkan konsep efisiensi alokasi dan operasional efisiensi akan lebih mendukung pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kemampuan keuangan daerah, pemerintah akan lebih tegas dalam mengalokasikan anggaran ke prioritas program atau kegiatan yang lebih jelas, terukur, dan efektif untuk dicapai. Selain itu, dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut pemerintah akan menggunakan sumber daya atau biaya sehemat mungkin dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga prioritas anggaran yang telah ditentukan, akan lebih mencerminkan terbentuknya anggaran yang berkualitas demi tercapainya sasaran pembangunan daerah. Selain kejelasan sasaran anggaran, tindakan evaluasi anggaran juga dibutuhkan dalam membentuk anggaran yang berkualitas. Tindakan evaluasi ini guna menjaga anggaran dari tindakan penyimpangan, sehingga anggaran yang direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, anggaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pertimbangan kejelasan sasaran anggaran akan tetap terjaga kualitasnya. Berikut ini pernyataan responden mengenai kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran di instansi tempat mereka bekerja.

Tabel 7 Pernyataan Responden Mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran dan Evaluasi Anggaran

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Kualitas Anggaran (kejelasan sasaran anggaran) - Pada instansi tempat saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas, spesifik, dan dapat dimengerti	SS	15	23,44
	S	49	76,56
	N	0	0
	TS	0	0

Mulyani, Fahmi, Wulandari, Rasyid & Ahyaruddin
 Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan ...

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
	STS	0	0
Jumlah		64	100
Kualitas Anggaran (evaluasi anggaran)	SS	4	6,25
- Pimpinan organisasi menganggap bahwa pegawai sendirilah yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran dalam unit tempat mereka bekerja	S	9	14,06
	N	24	37,5
	TS	12	18,75
	STS	15	23,43
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa sebanyak 15 pegawai atau sebesar 23,44% memberikan jawaban sangat setuju dan 49 pegawai atau sebesar 76,56 % memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa di instansi tempat mereka bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas, spesifik, dan dapat dimengerti. Hal ini menunjukkan bahwa instansi tempat mereka bekerja sudah memiliki kejelasan sasaran anggaran yang baik. Namun, di Tabel 7 juga dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang atau 23,43% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan 12 orang atau 18,75% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pimpinan organisasi menganggap bahwa pegawai sendirilah yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran dalam unit tempat mereka bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan organisasi belum tegas dalam mengingatkan bahwa pegawai/unit kerjalah yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran dari unit/departemen mereka.

Umpan balik anggaran juga dibutuhkan dalam membentuk anggaran yang berkualitas. Anggota organisasi perlu mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya dalam mencapai sasaran. Dengan demikian, anggota organisasi mempunyai dasar untuk merasakan keberhasilan atau kegagalan dan insentif yang diterima dari kinerja mereka yang baik. Selain itu, anggota organisasi juga akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan anggaran yang mereka lakukan. Hal tersebut sebagai umpan balik dari anggaran untuk pemerintah daerah agar bekerja lebih efektif dan menciptakan prestasi yang lebih baik ke depannya. Dengan mengetahui kelebihan dan keberhasilan pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah dapat menerapkan anggaran yang berkesinambungan ke depannya, sebagai bentuk penerapan disiplin fiskal agregat. Berikut ini pernyataan responden mengenai umpan balik anggaran di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 8 Pernyataan Responden Mengenai Umpan Balik Anggaran

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Kualitas Anggaran (umpan balik anggaran)	SS	5	7,81
- Saya diberi banyak umpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran saya	S	33	51,56
	N	21	32,81
	TS	3	4,69
	STS	2	3,13
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 33 pegawai atau sebesar 51,56% yang memberikan jawaban setuju terhadap

pernyataan bahwa mereka diberi banyak umpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aparaturnya pemerintah sudah merasakan umpan balik anggaran dengan baik yang dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih efektif dan prestasi yang lebih baik ke depannya.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa umpan balik anggaran dan kejelasan sasaran anggaran yang sudah baik belum didukung dengan tindakan evaluasi anggaran yang baik. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan tindakan evaluasi anggaran. Dengan memiliki umpan balik anggaran dan kejelasan sasaran anggaran yang baik serta didukung oleh evaluasi anggaran yang baik, maka akan lebih membentuk anggaran yang berkualitas. Dengan semakin meningkatnya kualitas anggaran, maka pengelolaan keuangan daerah kota pekanbaru semakin optimal, sesuai dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa kualitas anggaran merupakan faktor yang relevan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa H₂ terbukti signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi SIPKD berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Syahdi dan Bijaang (2018) yang menemukan bahwa implementasi SIPKD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai *effect size* yang dimiliki oleh variabel implementasi SIPKD menjelaskan bahwa implementasi SIPKD merupakan faktor yang relevan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SIPKD membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah secara efektif dan akurat. Hal ini sesuai dengan penelitian Yusup (2016) yang menemukan bahwa SIPKD mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selain itu, aplikasi SIPKD juga membantu melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban, serta juga memiliki fungsi yaitu menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. Berdasarkan fungsi aplikasi tersebut, tentu permasalahan pengelolaan keuangan daerah berupa penatausahaan kas, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib, permasalahan penganggaran dan manajemen kas, serta permasalahan lainnya dapat teratasi oleh aplikasi SIPKD, jika penerapan aplikasi tersebut ditunjang dengan kualitas informasi, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas sistem yang baik. Berikut ini pernyataan responden mengenai implementasi SIPKD di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 9 Pernyataan Responden Mengenai Implementasi SIPKD

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SS	13	20,31
	S	45	70,31
- <i>Software</i> yang digunakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat saya bekerja, mampu menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan teliti (terhindar dari kesalahan penyajian data)	N	4	6,25
	TS	2	3,13
	STS	0	0

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Jumlah		64	100
- <i>Software</i> di instansi tempat mereka bekerja terkadang terjadi <i>error</i> saat pemrosesan data	SS	6	9,37
	S	35	54,68
	N	20	31,25
	TS	2	3,12
	STS	1	1,56
Jumlah		64	100
- Pegawai membutuhkan waktu yang banyak untuk mempelajari dan mengoperasikan aplikasi	SS	4	6,25
	S	27	42,18
	N	17	26,56
	TS	16	25
	STS	0	0
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 45 pegawai atau 70,31% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa *Software* yang digunakan pada OPD tempat mereka bekerja, mampu menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan teliti (terhindar dari kesalahan penyajian data). Hal ini menunjukkan bahwa SIPKD sudah ditunjang dengan kualitas informasi yang baik. Namun, terdapat 35 pegawai atau 54,68% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa *Software* di instansi tempat mereka bekerja terkadang terjadi *error* saat pemrosesan data. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa SIPKD belum ditunjang dengan kualitas sistem yang baik, sehingga implementasi SIPKD belum berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian dapat diketahui juga bahwa sebanyak 27 orang atau 42,18% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa pegawai membutuhkan waktu yang banyak untuk mempelajari dan mengoperasikan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya pelatihan dan bimbingan yang lebih intens agar pegawai dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD dengan sangat baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi SIPKD sudah ditunjang dengan kualitas informasi yang baik, namun pemerinah daerah perlu meningkatkan kualitas sistem dan kualitas sumber daya manusia. Jika implementasi SIPKD sudah memiliki kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka implementasi SIPKD akan lebih terasa keefektifannya dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal, sesuai dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa implementasi SIPKD merupakan faktor yang relevan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa H_3 terbukti signifikan. Hal ini dapat dikatakan pengawasan fungsional memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Utami (2016) yang mengungkapkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Mahfiza (2016) juga menemukan bahwa

semakin baik pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian, maka pengelolaan keuangan daerah juga semakin meningkat. Nilai *effect size* yang dimiliki oleh variabel pengawasan fungsional menjelaskan bahwa pengawasan fungsional merupakan faktor yang relevan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan fungsional dengan menerapkan konsep *operational efficiency* akan lebih mendukung pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan fungsional dengan menerapkan konsep operasional efisiensi ini memiliki sistem dimana kontrol dilakukan lebih spesifik pada item pengeluaran, yaitu mengenai kesesuaian dengan aturan penganggaran dan aturan pemerintah. Inspektorat dan APIP juga perlu melakukan pre-audit sebelum dilakukan audit menyeluruh. Hal ini untuk mengurangi tingkat kesalahan penganggaran atau pengelolaan kegiatan. Berikut ini pernyataan responden mengenai pengawasan fungsional di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 10 Pernyataan Responden Mengenai Pengawasan Fungsional

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Pengawasan fungsional	SS	18	28,13
- Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan	S	35	54,69
	N	11	17,19
	TS	0	0
	STS	0	0
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 35 pegawai atau 54,69% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa instansi tempat mereka bekerja sudah melakukan pengawasan fungsional yang baik.

Pengaruh komitmen pimpinan yang memoderasi pengaruh kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah

- 1) Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa H_4 tidak terdukung atau tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini pernyataan responden mengenai komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas anggaran di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 11 Pernyataan Responden Mengenai Komitmen Pimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Anggaran

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Komitmen pimpinan	SS	16	25
- Pimpinan di instansi tempat saya bekerja selalu mengarahkan saya ketika saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan	S	36	56,25
	N	12	18,75
	TS	0	0
	STS	0	0
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 36 pegawai atau 56,25% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa pimpinan di instansi tempat mereka bekerja selalu mengarahkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan organisasi sudah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas anggaran. Namun, komitmen pimpinan tersebut masih belum mampu memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh kualitas anggaran yang dimiliki belum didukung dengan tindakan evaluasi anggaran yang baik. Pimpinan organisasi sudah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas anggaran, namun pimpinan belum memiliki tindakan yang tegas dalam mengingatkan pegawai/unit kerja tentang kesadaran pertanggungjawaban atas penyimpangan anggaran dari unit/departemen mereka. Komitmen pimpinan yang menerapkan teori/konsep *public expenditure management* ini membutuhkan kerja sama dan komitmen yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan konsep ini. Pimpinan yang sudah memiliki komitmen, namun tidak diiringi dengan kerja sama antara pimpinan dan anggotanya tentu akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, sehingga juga berdampak terhadap pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah.

2) Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa H_5 terbukti signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Yuliana dkk (2021) yang menemukan bahwa secara parsial komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen dan kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Selain itu, temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian Belo, dkk (2018) yang juga menemukan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi variabel sistem informasi manajemen terhadap kualitas pengelolaan BMD. Nilai *effect size* yang dimiliki juga menjelaskan bahwa komitmen pimpinan memiliki peran yang relevan dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPKD dalam mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pimpinan yang sudah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPKD, kemudian diiringi juga dengan implementasi SIPKD yang sudah berjalan efektif dan efisien, maka pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih optimal. Berikut ini pernyataan responden mengenai komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPKD di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 12 Pernyataan Responden Mengenai Komitmen Pimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Implementasi SIPKD

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Komitmen pimpinan	SS	14	21,88
- Pimpinan di instansi tempat saya bekerja selalu memelihara komunikasi dengan baik antara atasan dengan bawahan mengenai harapan dan keinginan pegawai	S	35	54,69
	N	15	23,44
	TS	0	0
	STS	0	0
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 35 pegawai atau 54,69% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa pimpinan di instansi tempat mereka bekerja selalu memelihara komunikasi dengan baik antara atasan dengan bawahan mengenai harapan dan keinginan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan organisasi sudah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPKD. Hal yang dimaksud di sini adalah pimpinan sudah berusaha melakukan sesuatu yaitu memelihara komunikasi dengan pegawai untuk mengetahui hal apa saja yang mendorong terciptanya kualitas implementasi SIPKD yang optimal, seperti harapan dan keinginan pegawai mengenai kualitas sistem yang memadai yang memudahkan mereka untuk bekerja, kemudahan dalam mengakses data, pelatihan dan bimbingan untuk mempelajari dan memahami cara mengoperasikan aplikasi dengan maksimal, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan sudah memiliki komitmen, kemudian pimpinan juga sudah berusaha membentuk kerja sama dengan cara memelihara komunikasi yang baik dengan pegawainya. Dalam hal ini, komitmen dan kerja sama merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan teori/konsep *public expenditure management*, dimana teori/konsep ini dapat mendukung pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah.

3) Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa H_6 tidak terdukung atau tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Yuliana dkk (2021) yang menemukan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Berikut ini pernyataan responden mengenai komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan fungsional di instansi tempat mereka bekerja:

Tabel 13 Pernyataan Responden Mengenai Komitmen Pimpinan Dalam Melakukan Pengawasan Fungsional

Kategori	Alternatif Jawaban	Frekuensi Responden	Persentase (%)
Komitmen pimpinan	SS	15	23,44
- Pimpinan di instansi tempat saya bekerja selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna membandingkan antara yang direalisasikan dengan yang direncanakan	S	37	57,81
	N	12	18,75
	TS	0	0
	STS	0	0
Jumlah		64	100

Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban 37 pegawai atau 57,81% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa pimpinan di instansi tempat mereka bekerja selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna membandingkan antara yang direalisasikan dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan organisasi sudah memiliki komitmen dalam melakukan pengawasan fungsional yang baik. Namun, komitmen pimpinan tersebut tidak mampu menjadi peran moderasi antara pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pimpinan yang tinggi sehingga melakukan segala hal agar tujuan organisasi tercapai tidak baik diiringi juga dengan pengawasan fungsional yang tinggi, karena akan mengakibatkan stres kerja pada anggota organisasi. Apabila pegawai mengalami tingkat stres yang tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Yasa, 2017). Tingkat stres yang tinggi, akan membuat kinerja pegawai menjadi rendah dan akan berakibat pada adanya penurunan kinerja, dan tingkat stres yang berlebihan menyebabkan karyawan dalam kondisi tertekan, karena tidak mampu lagi mengatasi tugas yang terlalu berat (Subroto, 2017).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga perlu upaya pengembangan pada penelitian selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada tiga OPD Kota Pekanbaru, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, sehingga generalisasi hasil dari temuan penelitian ini masih rendah. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif berdasarkan persepsi responden yang didapatkan melalui survei kuisioner, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan metode kualitatif melalui wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kualitas anggaran, implementasi SIPKD, dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, temuan dalam riset ini juga menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh implementasi SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas anggaran,

implementasi SIPKD, pengawasan fungsional, dan peran komitmen pimpinan sebagai pemoderasi merupakan determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Pekanbaru sudah memiliki kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran yang baik, namun pemerintah daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan tindakan evaluasi anggaran. Jika pemerintah daerah Kota Pekanbaru sudah memiliki kejelasan sasaran anggaran yang baik, evaluasi anggaran yang baik, dan umpan balik anggaran yang baik, maka pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang belum tertib, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru menjadi lebih optimal. Hasil data penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIPKD Kota Pekanbaru sudah ditunjang dengan kualitas informasi yang baik, namun pemerintah daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kualitas sistem dan kualitas sumber daya manusia. Jika pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka implementasi SIPKD akan lebih terasa keefektifannya dalam mengelola keuangan daerah, sehingga akan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai jawaban untuk mengetahui hal apa saja yang penting dan harus ditingkatkan kembali demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang mengembangkan teori/konsep *Public Expenditure Management* ini menghasilkan kebaruan ilmu dalam penganggaran sektor publik dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, khususnya pengoptimalisasian pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran dengan menerapkan konsep efisiensi alokasi dan efisiensi operasional dari *Public Expenditure Management* ini menghasilkan anggaran yang dialokasikan ke prioritas program yang lebih mencerminkan pemecahan masalah sasaran pembangunan, namun tetap mewujudkan keefisienan dalam penggunaan sumber daya. Sistem pengendalian manajemen dengan menerapkan konsep efisiensi operasional dari *Public Expenditure Management* ini memiliki sistem kontrol yang lebih spesifik terhadap item pengeluaran. Penelitian ini juga memberikan implikasi agar pemerintah daerah mengambil kebijakan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga permasalahan setiap tahun yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan yang tidak tertib bisa diatasi dan diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Afrida, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Kualitas Sistem Pelaporan Terhadap Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Padang). *Jurnal Akuntansi*, 5(2). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2585>
- Aziz, A., Riza, A. & Anwar.(2016). Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 1–10. <http://ejournal.pnl.ac.id/ekonis/index>
- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD Di Lingkungan

Mulyani, Fahmi, Wulandari, Rasyid & Ahyaruddin
Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan ...

- Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset* 1(2), 1–33.
https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.7
- BPK RI. (2020). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Diakses melalui: <https://riau.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-lhp-atas-laporan-keuangan-tahun-2019-kota-pekanbaru-kabupaten-indragiri-hilir-dan-kabupaten-kuantan-singingi/>.
- BPK RI. (2021). Penyerahan LHP LKPD Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Diakses melalui: <https://riau.bpk.go.id/penyerahan-lhp-lkpd-kota-pekanbaru-dan-kabupaten-kuantan-singingi-tahun-2020-2/>
- Fitra, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2388>
- Hasan, B. (2020). Hasil Audit LKPD Pemda Se-Riau 2018-2019, Kerugian Negara Rp.46,6 Miliar. Diakses melalui: <https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-audit-lkpd-pemda-seriau-20182019-kerugian-negara-rp466-miliar.html>.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, 707-721. <https://www.jstor.org/stable/245627>
- Lubis, I. & Saripudin. (2017). Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Komitmen dan Mutasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Komitmen Pimpinan Sebagai Moderating. *Jurnal Ilmiah WIDYA*. 4(2): 302–308.
- Mahfiza. (2016). Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Islam, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 12, 1–14.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/925>
- Octariani, D. (2017). Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The Case of a Structural Model Approach). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(2), 117–131. <https://doi.org/10.22146/jkap.23080>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Sauqi, M. I. (2017). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Peradaban, Jawa Tengah. <http://eprints.peradaban.ac.id/265/>
- Schick, A. (1999). A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. 29–46.
<http://unpcdc.org/>
- Shara, Y. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sholihin, M. & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Subroto, S. (2017). Analisis Pengaruh Locus of Control dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 18(2): 129-139.
<https://doi.org/10.30596/jimb.v18i2.1397>

- Syahdi, M. Z. & Bijaang, D. (2018). Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.88>
- Utama, I. K. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar. *HITA Akuntansi dan Keuangan*. 492-513. <https://ejournal.unhi.ac.id/>
- Utami, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1): 910-922. <https://www.neliti.com/publications/128112/pengaruh-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-kinerja-pegawai-pengawasan-meleka>
- Yasa, I. W. M. (2017). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Stres Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bali. *JAGADHITA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1): 38-57. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jagaditha/article/view/203>
- Yuliana, E. R., Taufeni, T. & Nasrizal. (2021). The Effect of the Quality of Application, Regulation, Management Information System, Internal Control System On Effectiveness of Fixed Assets Management In Bengkalis Regency Government With The Commitment of the Leader As A Moderation Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis and Entrepreneurship*, 10(2), 149–160. <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jebe/article/view/11>